TOLERANSI HIDUP UMAT BERAGAMA
(Studi Interaksi Sosial Menuju Integrasi Keagamaan di Mandau)

PRAYUGO[1], WIRA SUGIARTO[2], SAHRUL SORI ALOM HARAHAP[3]

Dosen STAIN Bengkalis
[1]e-mail: prayugomsi@gmail.com
[2]e-mail: wirasugiarto@gmail.com
[3]e-mail: sah30roel@gmail.com

Abstract

Social Interaction is a reality that exists in people's lives; interaction also shows a dynamic change that causes an individual or group to experience change. In Mandau sub district exists several religions, namely Islam, Catholic, Protestant, Konghucu, Buddha, and others. The existence of those religions brings very high tolerance attitude among the societies. Forms of social interaction towards social integration are the main needs in living a peaceful life in a society such as cooperation and accommodation in various fields. The research finding indicates that the social society interaction occurs in Mandau such as in National Holidays and Religious Holidays. Whereas in the field of education shows the integration among the students with different religions in the schools of Mandau sub district.

Keywords: Social Interaction, Religious, Integration.

PENDAHULUAN

Proses sosial merupakan sebuah pengetahuan yang sudah semestinya dipahami mengingat pengetahuan struktur masyarakat saja belum memadai dalam memperoleh deskripsi real mengenai kehidupan bersama manusia, hal yang sama disampaikan oleh Tamotsu Shibutani[187] bahwa seorang sosiolog sudah semestinya memahami transaksi-transaksi sosial yang mencakup kerja sama antar sesama masyarakat sebagai interaksi awal dalam membangun kehidupan gotong-royong. Hakikatnya masyarakat mempunyai bentuk-bentuk struktural, kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi dan kekuasaan yang memiliki tingkatan dinamika tertentu yang menjadi pola-pola perilaku yang berbeda dengan konteks dan situasi yang berbeda.[188] Sebelum hubungan atau interaksi tersebut memiliki bentuk yang kongkrit, terlebih dahulu akan dialami suatu proses kearah bentuk yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat.[189] Dengan demikian dapat diakatakan bahwa proses sosial adalah cara-cara berhubungan

[187] Tamotsu Shibutani, *Sosial Processes, An Introduction to Sociolgy* (Berkeley:University of California Press, 1986), h. 5

[188] Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 60

[189] Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu……* h. 60

yang dapat dilihat apabila orang perorang dan kelompok sosial saling bertemu dan menentukan suatu sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan yang menyebabkan kegoyahan pola-pola kehidupan yang telah ada.

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interkasi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama[190] bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial, pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang atau kelompok masyarakat memilik ketertarikan dalam bekerja sama dan saling bertukar informasi sebagai upaya mencapai tujuan bersama, pengadaan persaingan, pertikaian dan sebagainya. Maka dapat dikatakan bahwa interaksi sosial adalah dasar proses sosial, yang menunjukkan pada hubungan sosial yang dinamis dan tidak statis. Pada tahap ini interaksi masyarakat menjadi sebuah keharusan baik dalam bentuk positif maupun negative yakni dengan melakukan pertukaran tanda. Dalam bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, oleh karena itu interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktifitas-aktifitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang per-orang, kelompok dan lain-lain.[191] Pergeseran interaksi sosial dari rasa simpati menuju rasa imitasi dan semakin tak menentu terlebih ditengah masyarakat beragam adalah sebuah indikasi "Sakitnya" interaksi antar masyarakat yang berada diperkotaan Indonesia namun tidak menutup kemungkinan hal seperti diatas sudah terjadi masyarakat desa yang secara kultural sudah terkontaminasi globalisasi dan sukap apatisme. Adanya degradasi interaksi sosial menjadi cikal bakal adanya gesekan keagamaan yang asal-muasalnya tersulut bukan oleh sensitifitas agama melainkan oelh factor-faktor lain seperti ras, etnis, ekonomi, budaya dll.

Sekalipun secara tegas Indonesia bukan menganut paham negara berdasarkan agama tertentu melainkan dengan melakukan pemisahan antara Agama dan Negara *(Sekularisme)*, hal tersebut sebagai bentuk antisipasi dari para pendahulu untuk tidak mencampurkan antara urusan keagamaan dan kepentingan kenegaraan. Perkembanganya dimasyarakat mendapat tempat baik dan proposional dengan adanya lembaga-lembaga keagamaan yang mengatur kehidupan umat, dibentuk secara formal dibawah kendali pemerintah, meski berada pada kendali pemerintah agama selayaknya tidak dapat diinterpensi oleh siapapun termasuk negara. Kehadiran lembaga keagamaan sebagai bentuk mengupayakan agar tingkat penghayatan dan pelaksanaan kehidupan beragama berjalan baik, selaras dengan nilai-nilai humanistik dan tidak berseberangan dengan norma luhur Pancasila sebagai falsafah Negara. Sedangkan secara Informal pelaksanaan kehidupan beragama jauh lebih mengakar dalam tata pergaulan dengan ditandai berdirinya berbagai institusi keagamaan yang diprakarsai anggota masyarakat. Fungsi institusi ini adalah untuk meningkatkan pelaksanan kehidupan umat beragama dengan corak ragam yang relatif sama,

[190] Kimball Young dan Raymond, W. Mack, *Sociology and Sosial Life,* (New York: American Book Company), h. 137

[191] Gillin dan Gillin, *Cultural Sociology, A Revision of An Introduction to Sociology,* (New York: The Macmillan Company, 1945), h. 489

namun mengandung variasi dan pengaruh faham idiologi yang dianut, menjadikan keberadaan institusi itu beragama.

Sedangkan disisi lain, antara institusi agama yang formal dan informal kerap kali mendatangkan perbedaan dan pandanggan yang berlawaanan dalam mencari format yang tepat untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Indonesia. Suatu perbedaan muncul antara pendekatan legal normatif, yang digodok atas pertimbangan politis birokratis dan aspek kultural yang berangkat dari arus budaya bangsa. Kedua institusi ini mempunyai akses besar melakukan intervensi kehidupan individu keagamaan warga di Indonesia.

Akhir-akhir ini, kehidupan umat beragama di Indonesia terusik oleh faktor-faktor eksternal, seperti krisis ekonomi, gejolak sosial politik yang sulit ditebak dan proses pergantian pemerintahaan era Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Para analis sosial memperkirakan bahwa kondisi politik yang tidak menentu ini, kemudian menjadi pemicu lahirnya konfli-konflik antar uamat beragama; Baik dalam lingkup nasional maupun regional. Konflik agama mencapai kelimaksnya manakala kerusuhan-kerusuhan membawa korban jiwa dan harta, yang menjalar kedaerah-daerah yang komunitasnya sanggat taat beragama.

Dinamika konflik keagamaan acapkali melibatkan pemeluk agama dalam jumlah besar cendrung (Konflik Komunal) mempunyai dampak sosial politik lebih luas dan bahkan bersamaan kerusuhan itu menjadi momok ketakutan hingga menghilangkan interaksi antar umat beragama, usaha melakukan analisis tetap berlanjut dengan melakukan pengujian data konflik, apakah konflik tersebut terjadi oleh faktor unsur agama atau agama malah dijadikan sebagai kambing hitam dengan merepresentasikan konflik yang terjadi sebagai konflik agama dan diaggap suci bahkan diintruksikan untuk terjadi konflik horizontal dan antar agama. Tersulutnya suatu konflik sebenarnya sulit untuk dilakukan identifikasi apakah benar-benar pristiwa konflik agama disebabkan murni faktor ideologi atau agama hanya sebagai sarana yang sesungguhnya penyebab utama adalah perebutan pengaruh kekuasaan elit politik dalam membuat suatu *Frame* mencekam. Sekiranya yang benar adalah pernyataan pertama, maka dapat disimpulkan betapa rapuhnya pemahaman keagamaan bangsa kita ini; baik pemahaman dari aspek teologis maupun aspek sosial humanistik, dengan mudah masing-masing pemeluk agama melakukan bentrok antara umat beragama yang berbeda.

Pelaksanaan kehidupan kerukunan umat beragama selama ini menunjukan keraguan amat besar antara memahami benar-benar suatu ajaran agama sehinga terrefleksi kehidupan harmonis sehari-hari atau hanya karena tekanan kondisi sosial politik yang diciptakan rezim Orde Baru, sehingga kerukunan agama ditampilkan dalam dataran semu, hanya sebatas kerukunan agama yang bersifat elementry. Apabila penyataan yang benar adalah yang kedua, maka akan dipertanyakan mengapa begitu mudah pemeluk agama menerima pengaruh-pengaruh yang justru merugikan agama dan tatanan kehidupan berbangsa. Dengan demikian, penghayatan keagamaan seseorang masih belum menyentuh esensi nilai agama, yang menyuarakan konsep-konsep kemanusiaan dan kedamaaian, akhirnya mudah dipropokasi faktor-faktor diluar agama. Kepatuhan pada nilai keagamaan drajat implementasinya lebih rendah dibawah tekanan kondisi sosial

politik, yang kemudian berusaha menjadi katalisator munculnya konflik antar umat beragama.

Dalam kontek permberdayaan umat beragama, kedua faktor tersebut merupakan bagian penting untuk diminimalkan atau dihindarkan, sehingga konflik agama; baik yang disebapkan faktor agama itu sendiri maupun agama dijadikan sebagai instrumen kerusuhan tidak bakal terjadi. Pemeluk agama yang menghayati nilai-nilai agama tidak mudah dimasuki faktor-faktor di luar agama yang berkeinginan mempengaruhi secara negatif proses keutuhan bangsa. Institusi-institusi agama yang dijadikan sebagai bagian pemeluk agama melkukan kegiatan-kegiatan agama tidak mudah menjadi alat kekuasaan dan memperkeruh suasana kehidupan umat beragama.

Agama merupakan institusi Tuhan yang keberadaanya berfungsi menyeimbangkan sistem sosial yang tidak kondusif atau tidak seimbang. Secara substansial, institusi ini memuat serangkaian pristiwa sejarah, dokma-dokma yang bermuara pada perintah dan larangan, dan menyampaikan risalah kebijakan. Kebenaran-kebenaran agama diyakini sebagai kebijakan yang bersifat mutlak. Arti ajaran didalam ajaran agama, seseorang mendapatkan kebenaran absolut, yang nilai kebenaranya menduduki posisi superior, diatas segala kebenaran yang dilahirkan atas pemikiran manusia. Konsep kebenaran ini bukan saja tingkat absolutistiknya hanya diuji melalui logika pemikiran umat manusia, melainkan diyakini sebagai pegangan hidup, yang disimpan sampai ahkir hayat. Karena Agama memuat konsep kebenaran, nilai-nilai luhur dan bersifat sakral, maka pemahaman dan implementasi keagamaan dalam tata kehidupan sosial melibatkan aspek rasional dan emosional. Aspek rasional berupaya mempertimbangkan dasar-dasar akal fikiran manusia dalam menemukan kebenaran ajaran agama. Sedangkan aspek emosional mendudukkan fungsi agama sebagai institusi yang dirasakan penghayatannya secara intuitif. Patuh dan Ketawadhu'an seseorang menunjukkan keterlibatan keagamaan seseorang secara emosional dan rasional. Kedua aspek ini saling terkait dalam keyakinan keagamaan umat beragama.

Hal tersebut hemat penulis adalah fenomena *Apatisme* ditengah masyarakat dengan hanya mementingkan hidupnya, tanpa adanya interaksi antar sesama masyarakat dengan intensif dan *continue*. Sudah semestisnya pemerintah memberikan perhatian penuh atas reaksi dan etika sosial yang terdegradasi oleh kemajuan jaman juga faktor budaya barat yang semakin mendominasi hingga lupa kalau kita memiliki kearifan lokal sebagai regulasi interaksi sosial dan bisa menjadi bentuk integrasi sosial kemasyarakatan. Interaksi yang tak berjalan dengan baik akan berimplikasi pada integrasi masyarakat yang semakin semrawut dan tidak tertata sedemikian rupa hingga perilaku yang tidak sesuai dengan kearifan local serta norma-norma setempat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif tentang toleransi hidup beragama di pulau Bengkalis yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang interaksi sosial masyarakat Mandau dalam upaya integrasi sosial keagamaan, faktor perekat kelangsungan hidup kerukunan umat beragama, dan faktor-faktor yang menjadi sumber konflik kerukunan hidup umat beragama masyarakat Mandau. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif ini

menggunakan sosio kultural dan giografis wilayah yang patut diketengahkan dalam penelitian ini, karena dari melihat alasan inilah kemudian diketahui karakter Pulau Bengkalis sebagai lokasi sarana penelitian.

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap realita yang terjadi pada toleransi hidup beragama. Strauss dan Corbin mengatakan bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif memang dapat digunakan untuk mempelajari, membuka dan mengerti apa yang terjadi di belakang setiap fenomena yang baru sedikit diketahui.

Untuk mendapatkan data-data dilapangan, peneliti melakukan proses identifikasi daerah-daerah yang dijadikan sebagai sasaran penelitian. Kerangka pikir ini sangat penting untuk diketahui karena dengan cara melakukan identifikasi masalah ini kemudian diketahui tentang potensi dan kendala-kendala yang terdapat didaerah-daerah mana yang tepat dijadikan sasaran penelitian. Oleh karena itu, langkah pertama ini kemudian disusul dengan membuat kategorisasi daerah-daerah yang sudah tepat dijadikan sebagai lokasi untuk mendapatkan responden dalam penelitian. Penentuan responden ini diupayakan bersifat prural, yang tidak saja mereka berlainan agama, melainkan juga bagaimana responden dapat hidup berdampingansecara harmonis, akrab dan berjalan dalam kurun waktu lama.

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu menjadi dasar bagi peneliti berikutnya untuk mendapatkan gambaran analisa dan kesimpulan-kesimpulan apa saja yang telah dikemukakan. Hasil penelitian terdahulu dijadikan sebagai analisa kualitatif dalam bentuk khasanah referensi, sehinga menambah muatan-muatan teoritis sifatnya.

Pertama, peristiwa kerusuhan sosial yang menimpa masyarakat pekalongan mencuat kepermukaan. Berbagai masa media melansir pemberitaan kasus yang menimpa banya korban sekaligus mengagetkan kehidupanlkomunitas lain. Yang berawal dari penyobekan al-Qur'an yang dilakukan anggota komunitas masyarakat non Muslim, berkewargaan Indonesia dengan status etnis non peribumi. Dari peristiwa ini akhirnya menjadi pemicu kerusuhan, di kutip dari buku yang membuat ratusan umat Islam turun kejalan melakukan berbagai protes dan amuk masa. Selain kerusuhan tentang penyobekan al-Qur'an, juga selang dua tahun berikutnya terjadi peristiwa kerusuhan sosial, yang faktor pemicunya diakibatkan persetruan antara OPP tertentu. Kasus dan peristiwa ini kemudian dianggap sebagai bentuk melanggar aturan yang telah menjadi kesepakatan bersama diantara OPP itu sendiri. Peristiwa ini terjadi pada bulan Maret-Mai 1997. Yang banyak menimbulkan kerugian-kerugiab besar.

Kedua. Peristiwa kerusuhan yang terjadi di masyarakat sambas, tepatnya kerusuhan di Sanggau Ledo, terjadi pada September 1996. Pemicu dari kerusuhan itu adalah tindakan iseng yang dilakukan seorang yang bernama Bahari dan kawan-kawan. Bahari dan teman-temanya adalah pemuda pendatang, berasal dari suku Madura singgah dan berdomisili di Sangga Ledo. Pemuda tersebut dianggap telah berlaku kurang sopan dengan menarik tanggan, dan memaksa untuk naik kendaran dari beberapa orang gadis suku dayak. Mereka sama-sama bertempat

tinggal dalam satu wilayah kecamatan untuk diajak menonton pertunjukan musik dangdut yang digelar di kecamatan ledo. Dari awal peristiwa ini kemudian muncul serentetan pristiwa-peristiwa lain yang melibatkan antara komunitas suku Dayak dengan komunitas suku madura. Bentrok antara kedua suku yang berbeda agama ini, Akhirnya mencuat menjadi kerusuhan sosial yang bertendensi faktor agama. Termasuk yang mewarnai peristiwa yang akhirnya disebut sebagai kerusuhan sosial agama adalah perkelahian antar remaja suku madura dengan remaja suku Dayak, yang masing-masing masih dalam satu wilayah kesatuan geografis.

Menurut Nuhrisson M. Nuh dan Titik Suwariyati[192] sebagai seorang yang melakukan penelitian pristiwa sambas tersebut, adalah kehadiran kelembagaan informal yang sudah lama berkembang dan dipertahankan masyarakat-masyarakat adat menjadi bagian penting dalam upaya menyelesaikan kasus tersebut. Meskipun begitu, keikutsertaan lembaga formal yang berupa negara atau pemerintah setempat menjadi bagian yang ikut membantu menyelesaikan peristiwa.

Ketiga. Peristiwa kerusuhan sosial rengasdengklok. Rengasdengklok adalah suatu wilayah bersetatus kecamatan yang berada di wilayah kabupaten karawang Jawa Barat. Jarak rengasdengklok dengan kota kabupaten sekitar 20 Km sebelah selatan. Setiap oran dapat mencapai lokasi rengasdengklok melalui jalan darat, dengan kendaraan umum atau kendaraan peribadi.

Di daerah Rengasdengklok terjadi pegeseran jumlah pemeluk agama tertentu, yng diusebapkan adanya fenomena perpindahan antar pemeluk agama, terutama dari kelompok muslim yang miskin ke wilayah agama keristen katolik. Kasus Pindah agama ini memang merupakan hak individu seseorang, siapa-pun tidak boleh menjadi penghalang, tetapi dalam pelaksanaannya di masyarakat sering menimbulkan konflik. Dalam kondisi kehidupan keagamaan, demikian kasus kerusuhan rengasdengklok akhirnya menjadi konflik-konflik dengan menggunakan simbol keagamaan.

Peristiwa Rengasdengklok terjadi setelah ada gejala perselisihan antara sejumlah anak muda dengan seorang tetangga Musala Miftahul janah di kampung Warudoyong Rengasdengklok. Peristiwa kerusuhan diawali dengan tradisi membangunkan orang-orang yang makan sahur pada bulan ramadhan yang dilakukan secar turun-emurun oleh masyarakat Rengasdenklok ketika bulan suci ramadan tiba. Namu pada 21 Ramadan ketika seorang penganut agama islam memukul beduk sebagai tanda makan sahur, Seorang warga yang bertetangga dekat dengan mushala bernma Ciique marah-marah tanpa diketahui sebab, yang hanya karen suaminya sedang menderita sakit gigi. Dengan amarah yang tinggi, Cique memaki-maki pada orang yang memukul beduk dan disertai anaknya yang bernama Kimsan naik kelantai tinkat dua dan melempari batu bata ke atap mushala. Dari peristiwa itu terjadi amuk masa dan kemudian rumah Kim Tjai (suami Cique) dibakar masa dan semua barang-barang miliknya diambil tanpa tersisa sama sekali. Bahkan toko atau kios sebagai tempat berjualan milik korban dibakar dan dirusak oleh sebagian besar masyarakat yang sudah terbakar amarah,

[192] Nuhrison M. Nuh dan Titik S. *Studi kerusuhan sosial di sambas,* (Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Agama, 1999-2000), h. 106-107

masa menjadi semakin beringas. Sasaran utama adalah merusak sarana milik pribadi korban, yang dipergunakan untuk berjualan dalam menghidupkan keluarga.

*Keempa*t. Peristiwa kerusuhan soial di Situbondo. Kerusuhan yang timbul disitubondo adalah bersumber dari seseorang yang bernama mohammad saleh, dituduh melakukan pelecehan terhadap agama dan ulamak. Saleh adalah seorang berpendidikan sekolah menengah tingkat atas, sekaligus sebagai penjaga dan tukang kebun Masjid di desa Gebang Kecamatan kapongan. Shaleh dianggap melecehkan agama dan ulamak, sekaligus berani melecehkan ulamak tersohor yaitu As'ad Syamsul Arifin, seorang ulamak besar yang memangku dan pemimpin pondok pesantren di asembagus situbondo dan pernah menjabat pengurus besar organisasi Nahdatul ulamak. Dosa yang dipikul saudara shaleh adalah melakukan pelecehan terhadap Kiai As'ad dengan mengatakan bahwa ketika Kiai As'ad meninggal dunia masih dianggap Islamnya belum sempurna dan kurang tinggi pengetahuan keagamaannya.

Ketika kasus Shaleh diadili di persidangkan di pengadilan Negri, dengan tuntutan hukuman lima tahun penjara- diajukan kejaksaan sesuai dengan tuntutan maksimal dalam peraturan perundang-undangan, maka serempak para pengunjung yang ikut mendengarkan dan melihst persidangan tersebut berteriak mengeluarkan kata kata kecaman-kecaman yang amat keras terhadap tuntutan tersebut. Mereka menuntut lebih dari itu, yaitu hukuman mati, karena perbutan shaleh dianggap salah besar dan dikategorikan sebagai orang yang murtad. Hukuman yang dijatuhkan kepada shaleh diangap ringan dan sangat tidak sesuai dengan kesalahan-kesalahan yang diperbuat.

Komunitas yang tidak merima keputusan jalanya persidangan di pengadilan Negri ini, melakukan pembakaran kantor pengadilan. Kondisi masaa yang begitu besar makin menunjukan sikap berutal, sehinga tidak mampu mengendalikan emosinya. Sambil berlari dalam kondisi bergerombol, seolah-olah menunjukkan solidaritas massa yang solid, kemudian melakukan pengerusakan dan pembakaran tempat-tempat yang dijadikan sebagai sarana ibadat agama tertentu. Peristiwa ini memakan korban besar, termasuk kerugian yang diderita pengikut agama kristen karena greja-gereja menjadi amuk massa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Akhsanul Khalikin, menyimpulkan bahwa peristiwa Situbondo adalah akibat dari faktor yang berda di luar agama, yaitu termasuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang diderita umumnya masyarakat islam diwilayah Situbondokemudian Akhsanul Khalikin menyatakan bahwa, yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah adalah kebijakasanaan pendirian sarana ibadah yang dilakukan setiap komunitas agama harus diberikan aturan-aturan jelas dan tidak memihak kepada kelompok tertentu, sehinga tidak akan melahirkan kesenjangan sosial kegamaan diantara mereka. Terkait dengan itu, termasuk faktor penyebaran agama yang dilakukan kelompok-kelompok penganut agama harus lebih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat tidak menimbulkan kecurigaan dan kemarahan penganut agama lain.

Peristiwa ini kemudian membangkitkan upaya Gu kalangan benur Jawa Timur menyerukan dan meminta kepada tokoh agama yang terlibat, terutama ulamak ikut membantu terciptanya kondisi aman dan tenang, terutama terhadap

kenyamanan ibadah ritual keagman peganut agama minoritas. Ulamak dianggap sebagai tokoh dan simbol komunitas agama islam. Peran ulamak paling efektif menjadi mediator yang berwawasan panjang dalam menangani masalh sensitifstik agama. Kiai Misbach, sebagai ketua umum MUI jawa Timur, mengharapkan masyarakat islam mampu mengendalikan diri dan tidak terpancing hal-hal yang merusak umat itu sendiri.

KONSEPSI YANG DIBANGUN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT SEBAGAI SEBUAH UPAYA INTEGRASI SOSIAL

Peran dan sumbangsih para tokoh agama dan masyarakat dalam menciptakan suasana masyarakat yang kondusif dan terintegrasi secara social merupakan hal yang sangat vital dan urgen, dimana setiap tokoh baik Agama dan Masyarakat pada umumnya memiliki charisma tersendiri dan memiliki power serta kepercayaan penuh masyarakat dalam melakukan sesuatu baik yang sifatnya positif dan negative sekalipun. Mencermati hal tersebut diatas penulis melakukan observasi lapangan sekaligus wawancara dalam melihat secara langsung fenomena yang terjadi ditengah masyarakat Mandau dengan tingkat kompleksitas masyarakat yang sangat tinggi.

1. Lembaga Adat Melayu (LAM) Mandau

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau resmi didirikan pada hari Sabtu, 1 Rabiul Akhir 1390 H (6 Juni 1970 M) di Pekanbaru, dengan nama Lembaga Adat Daerah Riau. Pemrakarsanya, tokoh-tokoh Melayu Riau dari berbagai latar dan profesi, yaitu pejabat pemerintahan, ulama, ilmuwan/cendekiawan dari perguruan tinggi di Riau, budayawan, seniman, sastrawan, dan orang patut-patut yang berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Melayu Riau. Dari kalangan pemerintahan, tokoh utama pembentukan lembaga ini ialah Gubernur Riau waktu itu, Arifin Achmad. Sewaktu pembentukan, beliau menyatakan, "Perlu adanya perkumpulan pemuka adat Melayu Riau yang berbentuk sebuah Lembaga Adat untuk menggalang persatuan, kesatuan, pendapat dan pikiran serta *membangkitkan batang terendam* yang diwariskan oleh para pendahulu di Riau". *Batang terendam* itu ialah jatidiri/identitas budaya di dalam dinamika ke-Indonesia-an.[193]

Komplesitas masyarakat Mandau[194] cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang setingkat maka tidak mengherankan jika daerah "industri" ini menjadi sorotan[195] banyak pihak. Masyarakat Mandau sendiri cukup beragam[196] ada suku Melayu, Akit, Minang, Batak, Jawa, Bugis, China dan lain-lain. Sebagai sebuah payung adat LAM-R Mandau bertugas dalam mengakomodir semua suku adat budaya yang masuk kedaerah tersebut[197]

[193] https://lamriau.id/profil-lam-riau/ diakses 11/24/2018

[194] Mandau adalah salah satu kecamatan dikabupaten bengkalis, Riau.

[195] Kompleksitas masyrakat dikhawatirkan menjadi sebuah "bom" waktu yang memicu adanya gesekan antar sesama masyarakat dan antar umat beragama.

[196] Data dan demografis kec. Mandau

[197] wawancara dengan ketua LAM-R Kec. Mandau H. Zulfikar, M.A.

dengan catatan melakukan koordinasi dengan pihak LAM-R sebagai pemangku kebijakan Adat yang sah di daerah tersebut.

> "semua adat, budaya, etnis dan agama yang masuk ke Mandau memiliki hak dan kewajiban bersama dan tidak ada diskriminasi selama masih pada tataran yang wajar dan tidak menggangu stabilitas Mandau" (H. Zulfikar, M.A)

Penyataan tersebut diatas merupakan ungkapan keterbukaan terhadap seluruh unsur masyarakat untuk melakukan sebuah integrasi dan penyadaran terhadap semua tentang adanya kenyataan perbedaan. Selain itu LAM-R juga memiliki agenda rutin dalam melakukan koordinasi antar suku dan budaya yang ada dengan melakukan melakukan pertemuan rutin dengan setiap organisasi adat dan budaya yang ada dalam upaya monitoring sosial kemasyarakat.

2. Majelis Ulama Islam (MUI) Mandau

Upaya membangun integrasi oleh MUI Mandau tidak beda jauh dengan LAM-R, sebagai lembaga keagamaan islam MUI Mandau menjadi salah satu lembaga yang ikut memperhatikan kondusivitas keagamaan di Mandau yakni dengan memperhatikan segala aktivitas keagamaan agar tidak "melenceng" dari kaidah keagamaan yang sudah ada untuk menjaga kerukunan umat beragama.[198]

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa menguarangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda , sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri.

3. Persatuan Gereja Mandau

Interaksi antar umat beragama merupakan sebuah keharusan apalagi dalam keberagaman yang sangat kompleks, maka tidak jarang baik antar institusi keagamaan maupun para tokoh keagamaan melakukan diskusi serta dialog keagamaan dalam menyatukan sebuah persepsi terhadap sebuah permasalahan yang ada maupun yang akan terjadi, Sebagai antisipasi adanya eskalasi yang lebih tinggi dari sebuah konflik yang ada. Kerukunan akan selalu terjaga jika setiap unsur masyarakat menjaga dan saling menghargai satu sama lain, komplesksitas mandau sebagai daerah industri menjadi sebuah kajian dalam antisipasi ketidakstabilan. Pihak gereja sebagai pemangku lembaga keagamaan selalu mengupayakan adanya interaksi intens dengan lembaga keagamaan lain demi menghasilkan integrasi antar umat

[198] Wawancara dengan ketua MUI Mandau H. Zulkifli Jannaim

beragama. Integrasi disini bukanlah penyatuan akidah atau agama melainkan sebagai upaya membangun harmoni ditengah keragaman yang ada.[199]

4. Pemerintah dan kontrol sosial di Mandau

Kebijakan social (social policy) adalah kebijakan public (public policy) yang penting di Negara-negara modern dan demokratis[200], sejarah menyaksikan bahwa semakin maju dan demokratis suatu Negara semakin tinggi pula perhatian Negara terhadap kebijakan social sebaliknya dinegara-negara pra-sejahtera dan otoriter kebijakan social kurang mendapat perhatian.

Kebijakan social pada hakikatnya merupakan kebijakan public dalam bidang kesejahteraan social yang dianggap berbanding lurus dengan lahirnya stabilitas masyarakat baik secara ekonomi, pendidikan dan bidang kehidupan yang lain yang dianggap dapat menjaga kondusivitas kehiduapn masyarkat dan Negara. Program-program yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan dianggap dominan dalam upaya meminimalisir potensi konflik baik secara vertikal dan horizontal. Upaya pemerintah dalam menghimpun potensi kerukunan bisa diperhatikan dibawah ini, yakni:

a. Camat Mandau

Sebagai pemangku kebijakan didaerah tingkat kecamatan camat memiliki tanggung jawab penuh dalam memperhatikan sosio-masyarakatnya mulai dari hal paling mendasar sampai pada hal-hal yang besar seperti pendidikan, pekerjaan dan kesejahteraan hingga menjaga warganya dari berbagai ancaman yang siap menghadang seperti konflik horizontal dan konflik vertical sekalipun. Dalam upaya membangun stabilitas daerah dengan kompleksitas tinggi pemerintah berupaya untuk memfasilitasi warganya yang berbeda dalam event-event tertentu tanpa membedakan dan memaksimalkan potensi masyarakat dalam membangun sebuah peradaban yang berkemajuan.

Dialog social keagamaan kerap dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai fasilitator untuk menjembatani dan menampung setiap aspirasi masyarakat serta menghimpun adanya informasi "sumbang" untuk segera ditindak lanjuti dan diselesaikan seoptimal mungkin.[201]

b. Kementerian Agama

Kementerian agama kecamatan Mandau juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak beda jauh dengan camat seperti yang disebutkan diatas, hanya saja kementerian agama lebih spesifik menjembatani interaksi dan integrasi antar umat beragam ditengah keragaman masyarakt beragama. Pada umumnya setiap masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab yang sama namun kadangkala kehidupan beragama menjadi sebuah sekat tersendiri terhadap kehidupan dalam bermasyarakat.

---

[199] Wawancara dengan Ketua Gereja Mandau, Henry Banuarea,…..

[200] Edi Suharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Public,* (Bandung: penerbit Alfabeta, 2013), hal. v

[201] Wawancara dengan camat Mandau….

Kementerian agama bertugas dalam memonitor setiap aktivitas kehidupan beragama masyarakatnya lewat divisi keagamaan yang ada, hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengantsipasi isu-isu kehidupan beragama yang kerapkali menjadi pemantik konflik dan memiliki potensi yang cukup dominan dalam kehidupan antar umat beragama

c. Forum Kerukunan Umat Beragama Mandau

Forum kerukunan umat beragama (FKUB) menjadi pintu utama dalam membuka pintu kerukukunan, dimana lembaga ini memiliki tugas yang spesifik tentang kerukunan masyarakat. Maka baik secara langsung dan tidak langsung FKUB mengemban tugas dalam memfasilitasi dan membuat forum-forum kajian dan diskusi antar umat beragama.

Pada beberapa kasus yang pernah ada FKUB menjadi pilar tersendiri dalam merdakan ketegangan yang ada dengan memfasilitasi pihak-pihak yang dianggap bertikai. Posisi netral dianggap strategis baik dalam kajian dan dialog menjadikan FKUB menjadi rekonsilator yang dapat dipoercaya masyarakat dalam membangun sebuah kedamaian ditengah keragaman masyarakat

KESIMPULAN

Secara umum interaksi sosial di Kecamatan Mandau mengarah pada bentuk interaksi yang assosiatif, meskipun ada pula potensi yang mengarah pada dissosiatif. Interaksi assositif meliputi akomodasi berupa sikap toleansi yang cukup baik dalam hal kehidupan beragama; asimilasi dalam bentuk asimilasi budaya terutama asimilasi antara agama dan budaya yang mempererat pertalian dua hal tersebut, dan amalgamasi yang mempererat hubungan antar keluarga, di mana interasi budaya dan amalgamasi semakin mempererat kerukunan antar warga terutama antar umat beragama, Interaksi dan Harmoni Umat Agama. kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan budaya yang yang mengemas tradisi keagamaan seperti kegiatan Hari besar nasional Dan keagamaan . Namun demikian interaksi yang dissosiatif juga terjadi di Kecamatan mandau, yaitu munculnya persaingan dalam syiar agama yang mengarah pada bentuk pertentang, seperti yang ditunjukkan dalam peristiwa Pembangunan Ruko Menjadi Gereja. Rumah Adat Tapanuli. Keterkaitan antara agama dan budaya di Mandau membentuk pola agama kooperatif budaya, di mana agama mau dan mampu berkelin dan saling memperkaya tradisi keagamaan dan budaya masyarakat. Tetapi juga ada pula pola yang membentuk agama versus budaya, di mana pemahaman agama yang cenderung ekslusif tidak bersedia berintegrasi dengan budaya. Akibatnya kerukunan masyarakat yang memiliki tradisi budaya berbeda dan nilai agama yang berbeda dapat terancam. Sementara di aspek kehidupan yang tidak tekait langsung dengan agama, masyarakat Mandau cenderung bersifat kosmopolitanisme, yaitu bisa menerima keberadaan orang lain tetapi kurang aktif untuk menjalin hubungan kerjasama. Hal ini pun kurang mendukung terbinanya kerukunan umat beragama di Mandau. Dengan demikian kota Mandau termasuk kota yang memiliki tingkat kerukunan tinggi dengan potensi konflik. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan dan mengembangkan interaksi assosiatif antar

umat beragama. sehingga semakin meningkatkan kerukunan beragama di Mandau. Adapun potensi-potensi konflik harus diantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang dapat menggangu kerukunan umat beragama di Mandau. Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, maka pemerintah, terutama Kementerian Agama perlu meningkatkan sosialisasi pemahaman keagamaan yang inklusif, terbuka, moderat dan saling bekerjasama pada masyarakat sehingga mendukung upaya aktif mewujudkan kerukunan umat beragama. Pemerintah secara aktif harus turut menfasilitasi kelompok-kelompok sosial, budaya dan keagamaan untuk membicarakan agenda-agenda kegiatan budaya agar tidak menjadi persaingan yang kurang sehat dan mengarah pada pertentangan atau konflik, tetapi sebaliknya agenda kegiatan budaya tersebut dapat saling mengisi dan mengautkan kerukunan masyarakat, khususnya umat beragama. Tokoh-tokoh agama dan budaya di Mandau juga perlu untuk menjalin kerjasama antar umat beragama dalam bidang budaya, serta melakukan rekacipta budaya yang mempererat interaksi antar umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

Tamotsu Shibutani, 1986, *Sosial Processes, An Introduction to Sociolgy*, Berkeley:University of California Press

Soejono Soekanto, 2004, *Sosiologi Suatu Pengantar,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kimball Young dan Raymond, W. Mack, tt, *Sociology and Sosial Life,* American Book Company, New York

Gillin dan Gillin, 1945, *Cultural Sociology, A Revision of An Introduction to Sociology,* New York: The Macmillan Company

Nuhrison M. Nuh dan Titik S, 1999-2000, *Studi kerusuhan sosial di sambas,* Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Agama

Edi Suharto, 2013, *"Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Public",* Bandung: penerbit Alfabeta

https://lamriau.id/profil-lam-riau/ diakses 11/24/2018